

**KEBIJAKAN TRUST BUILDING PROCESS PRESIDENT PARK GEUN-HYE
DALAM UPAYA REUNIFIKASI SEMENANJUNG KOREA**

*The President Park Geun-Hye Trust Building Process Policy
regarding to Korean Peninsula Reunification Effort*

**Indah Chairunnisa Ariefa
20120510059**

Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas ISIPOL
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Abstrak

Sejak terpilih sebagai Presiden ke-11 Republik Korea, Park Geun-Hye memilih untuk menggunakan kebijakan *Trust Building Process* sebagai langkah utama dalam penyelesaian konflik Semenanjung Korea dan mencapai proses reunifikasi. Kebijakan ini juga mengundang banyak perhatian karena kebijakan ini diterapkan berdasarkan konsep kepercayaan yang sebelumnya belum pernah diterapkan di pemerintahan sebelumnya. Selain itu, kepribadian Park Geun-Hye yang mencintai perdamaian dan menghindari konflik juga menjadi harapan bagi elemen masyarakat Korea dan dunia akan keberhasilan dari kebijakan ini. Konsep kebijakan berbasis kepercayaan ini mendapatkan dukungan dari dalam pemerintahan dan negara kerjasama Korea Selatan. Dalam tulisan ini, penulis bertujuan untuk menjelaskan tentang pilihan Presiden Park Geun-Hye menggunakan kebijakan *Trust Building Process* sebagai salah satu cara untuk mewujudkan reunifikasi semenanjung Korea yang telah lama memiliki hubungan yang penuh dengan konflik dan saling tidak percaya.

Abstract

Since elected as the 11th President of the Republic of Korea, Park Geun-Hye set Trust Building Process policy as a key step in conflict resolution of the Korean Peninsula and achieve the reunification process. This policy is applied based on the concept of trust. This policy also invited a lot of attention because this policy is based on the concept of trust that had not been implemented in the previous administration. In addition, Park Geun-Hye personality who loves peace and avoiding conflict is also a hope for Korean Peoples and the international community for the success of this policy. The concept of trust-based policy is getting support from the state government and South Korean. This paper aims to explain the preference of President Park Geun-Hye use policy Trust Building Process as one way to realize the reunification of the Korean peninsula that has long had a relationship full of conflict and mistrust.

Keyword : *Trust Building Process Policy, Park Geun-Hye, Reunification.*

Pendahuluan

Pasca merdekanya tanah Korea dari kolonialisme Jepang, persoalan ideologi menjadi hal utama dalam menetapkan kepemimpinan pemerintahan Bangsa Korea. Kim Il Sung sebagai pemimpin kemerdekaan dibagian utara menghendaki untuk penggunaan ideologi komunisme sebagai landasan pemerintahan Bangsa Korea. Berbeda dengan keadaan di bagian selatan dibawah kepemimpinan Syngman Rhee menginginkan Korea untuk bersatu dibawah pemerintahan demokrasi-kapitalis. Perbedaan ideologi yang terus terjadi berakhir pada perang saudara pada tahun 1950 yang diawali dengan penyerangan secara langsung pasukan Korea Utara kepada pasukan Korea Selatan. Setelah kurang lebih 3 tahun melakukan perang saudara, pada tanggal 27 Juli 1953 kedua belah pihak melakukan gencatan senjata yang menandakan berakhirnya perang saudara, akan tetapi ketika perang saudara selesai bukan berarti permasalahan diantara keduanya juga terselesaikan. Sampai saat ini, kedua Korea belum melakukan perjanjian damai sehingga secara tidak langsung kedua negara masih dalam keadaan berperang. (Yang, Seung Yoon dan Mochtar Mas'oe'd, 2005)

Akibat tidak adanya perjanjian damai, kedua belah pihak masih terus berupaya untuk menyatukan semenanjung Korea (reunifikasi) dengan ideologinya masing-masing. Pihak Korea Utara menggunakan kekuatan militernya untuk berusaha menyatukan semenanjung Korea dibawah Komunisme sedangkan pihak Korea Selatan yang beraliran demokrasi-kapitalis berusaha untuk melakukan perundingan dan negosiasi untuk mencapai kesepakatan reunifikasi. Keseriusan Korea Selatan dalam usahanya melakukan reunifikasi dimulai dengan mendirikan Kementerian Unifikasi Korea (Ministry of Unification) pada tahun 1 Maret 1969. Hingga pada tahun 1990, proses reunifikasi menunjukkan kemajuan yang menjanjikan.

Beberapa kebijakan telah berusaha dirancang dan diterapkan oleh pemerintah Korea Selatan untuk mencapai kesepakatan damai dan reunifikasi, akan tetapi belum bisa memberikan hubungan yang baik bagi kedua belah pihak. Pada pemilu 2013, Korea Selatan memiliki pemimpin baru. 25 Februari 2013, Park Geun-Hye dilantik menjadi presiden ke-11 Republik Korea. Presiden Park merupakan Presiden perempuan pertama Korea Selatan dan selain itu Presiden Park merupakan anak dari Presiden Korea ke-3 Park Chung-Hee yang terkenal sebagai pemimpin yang diktator sekaligus sebagai bapak pembangunan Korea Selatan. Sebagai seorang kepala negara, maka sangat penting bagi Park Geun-Hye untuk melakukan upaya secara maksimal dalam memilih kebijakan politik luar negeri yang terbaik terhadap Korea Utara agar tidak menimbulkan konflik yang lebih besar serta proses reunifikasi dapat segera terlaksana.

Di masa pemerintahannya, Presiden Park menerapkan kebijakan terhadap Korea Utara berbasis kepercayaan atau trust yang kemudian dikemas dalam sebuah kebijakan Trust Building Process. Sesungguhnya, konsep kepercayaan ini telah diinisiasi Presiden Park pada tahun 2011 dalam sebuah artikel yang ditulisnya pada laman Foreign Affairs yang berjudul A New Kind of Korea: Building Trust Between Seoul and Pyongyang. Pemerintahan Presiden Park Geun-Hye telah menetapkan bahwa pada kebijakan Trust Building Process berdasar pada fondasi keamanan yang solid, dengan tujuan untuk membangun kepercayaan antar kedua Korea dan membangun sebuah proses reunifikasi dengan cara yang damai. (Cheon, 2013) Selain itu, terdapat tiga poin utama dalam Trust Building Process untuk menjalankan reunifikasi yang damai yaitu pertama,

menyelesaikan permasalahan masyarakat Semenanjung Korea melalui cara yang humanitarian, kedua, membangun kembali homogenitas antar masyarakat Semenanjung Korea dan yang ketiga adalah membangun infrastruktur kesejahteraan masyarakat untuk kesejahteraan ekonomi Semenanjung Korea. (Unification, Vision for The Unified Korea, 2015)

Dalam mengambil sebuah kebijakan, aktor pengambil kebijakan akan memilih dan memaksimalkan kesempatan untuk mencapai kepentingannya. Seorang aktor pengambil keputusan akan bersikap konsisten, memilih bagaimana bertindak dengan pertimbangan konsekuensi terhadap kesejahteraan pribadinya maupun kerabat terdekatnya. Rasionalitas merujuk pada proses tindakan, bukan pada hasil akhir atau bahkan keberhasilan dalam mencapai suatu keinginan. Proses tindakan rasionalitas tersebut dilatarbelakangi oleh fenomena dan kejadian sosial yang sangat kompleks, sehingga seorang pengambil keputusan dapat mengambil sebuah keputusan berdasarkan apa yang telah dialaminya.

DINAMIKA KEHIDUPAN PRIBADI DAN KARIR POLITIK PRESIDEN PARK GEUN-HYE

Presiden Park Geun-Hye mengalami proses yang sama pula dalam pola pikir rasionalnya dalam menentukan kebijakan *Trust Building Process*. Terpilihnya Park Geun-Hye sebagai presiden Republik Korea tidaklah mudah, pencapaian politik tertinggi Park Geun-Hye tidak semata-mata didapatkan melalui faktor keturunan, akan tetapi melalui proses sosial kehidupan pribadi, dinamika politik Semenanjung Korea hingga proses karir politiknya sangat mempengaruhi keberhasilan Park dalam menjadi pemimpin tertinggi Korea Selatan.

Presiden Park merupakan anak dari mantan Presiden Park Chung-Hee yang dikenal sebagai pemimpin dengan gaya kepemimpinan otoriter. Park Geun-Hye kecil memulai masa kanak-kanaknya di Seoul setelah seluruh keluarganya pindah dari daerah Daegu pada tahun 1953. Kepindahan keluarga Park Geun-Hye menyusul selesainya perang saudara terhadap Korea Utara dan Park Chung-Hee memulai untuk mengumpulkan kekuatan untuk melawan pemerintahan. Park kecil dididik dengan lingkungan politik dan militer dan dalam urusan religi, Park kecil juga dididik dengan pendidikan agama Budha dan sangat kental dengan aliran konfusianisme. Ajaran konfusius juga diterapkan Park Geun-Hye dalam kehidupan berpolitik dan hubungan sesama manusianya sampai saat ini. Ajaran konfusius itu meliputi: 1). Keadilan dan kebenaran harus ditandai dengan hubungan antara subyek dan objek yang berdaulat; 2) Harus ada hubungan yang tepat antara orang tua dan anak; (3) Pemisahan fungsi antara suami dan istri; 4) yang lebih muda harus mendahulukan tetua; dan 5) Iman kejujuran dan kepercayaan harus memerintah atas hubungan antara sesama teman dan keluarga. (Lee, 2012)

Park memulai pendidikan dasarnya hingga menengahnya di Seoul dan kemudian melanjutkan pendidikan tingginya di Universitas Sogang dengan mengambil jurusan teknik elektro. Setelah menempuh pendidikan tingginya, Park sempat menempuh pendidikan lanjutan di Paris, Perancis pada tahun 1974 dengan mengambil jurusan yang sama, akan tetapi pendidikannya tidak terselesaikan karena sang ibu, Yuk Young-Soo meninggal akibat tertembak oleh mata-mata Korea Utara, Mun Se-Kwang. Setelah kepergian Yuk Young Soo, Park Geun-Hye secara langsung menggantikan posisi sang ibunda sebagai ibu negara. Park Geun-Hye memulai hidup dengan kebiasaan di istana Blue House dan kehidupan politik yang lebih nyata sebelum ia menjadi ibu negara termuda di Korea Selatan. Park Geun-Hye mendedikasikan

dirinya untuk mendampingi sang ayah untuk membangun Korea, seperti yang ia tulis dalam buku hariannya, ia mengatakan bahwa:

*“ My greatest duty is to show the nation that my father is not alone.
I have given up on my dreams to live as an ordinary person.
I have thrown away my dreams of living a simple life”* (House, 2014)

Selama Park menjalani kehidupannya sebagai ibu negara, Park Geun-Hye mendapatkan banyak pelajaran politik yang tidak didapatinya secara formal. Pendidikan politik Park Geun-Hye secara langsung diajarkan melalui sang Ayah, Park Chung-Hee, serta tamu-tamu kenegaraan, tokoh-tokoh politik dan cendekiawan yang ia temui pada saat acara formal maupun acara non-formal kenegaraan. Perannya sebagai pemimpin *Yuk Young Foundation* yang bergerak dalam bidang kemanusiaan, kemiskinan dan pembela kaum marginal peninggalan sang ibunda juga semakin memperkuat image ibu negara yang baik di mata masyarakat Korea Selatan. Selama mendampingi sang ayah, Park Geun-Hye juga menaruh perhatiannya jaminan suransi kesehatan untuk orang tua dan rakyat yang kurang mampu, yang tidak ada di Korea Selatan pada waktu itu. Dia mengatakan kepada ayahnya bahwa Korea Selatan membutuhkan skema asuransi kesehatan nasional dan akhirnya pada tahun 1977 sesuai dengan inisiatif Park Geun-Hye, Korea Selatan meluncurkan program asuransi kesehatan. (House, 2014)

Kesedihan Park Geun-Hye akan kehilangan orang yang dikasihinya terulang kembali pada tanggal 26 Oktober 1979. Park Chung-Hee tewas terbunuh oleh kepala layanan kemanannya sendiri yang juga merupakan kepala Korean Central Intelligence Agency (KCIA) yang didirikan oleh Park Chung-Hee pada tahun 1969, Kim Jae Gyu. Park terbunuh bersama dengan Cha Ji Chul, seorang kepala pengawal pribadi Park Chung-Hee setelah mereka bersama-sama menghadiri jamuan di Gungjeong-dong, Jongno-gu, Seoul. Park Geun-Hye mengalami guncangan hebat dan sempat mengalami putus asa dengan mengatakan:

“If I were born into an ordinary family and if my parents hadn't passed away in that way, I wouldn't have had to go into politics” (House, 2014).

Kematian Park Chung Hee menandakan bahwa tugas Park Geun-Hye menjadi ibu negara juga telah usai. Berakhirnya tugas sebagai ibu negara mendatangkan kesempatan Park untuk menata hidup yang lebih baik setelah dua kejadian yang sangat memilukan selama kurang dari sepuluh tahun dialaminya dengan tidak muncul sebagai politisi aktif di dalam per-politikan Korea Selatan. Park lebih banyak menghabiskan hidupnya untuk melakukan kegiatan sosial kemanusiaan dan kegiatan keagamaan serta menambah pengalamannya dalam berbagai pendidikan. Krisis ekonomi yang melanda Korea Selatan dan sebagian besar wilayah Asia pada tahun 1997, membuat Park Geun-Hye memutuskan untuk kembali mengabdikan kepada negara yang ia cintai. Park memulai karir politiknya setelah vakum selama kurang lebih 20 tahun setelah kejadian pahit yang dialaminya pada tahun 1974-1979. Untuk memulai kiprah politiknya, Park Geun-Hye memilih untuk bergabung dalam Grand National Party (GNP) yang merupakan partai baru gabungan dari partai New Korea Party and the Democratic Party tahun 1998 yang kemudian berganti nama menjadi Partai Saenuri yang akhirnya membawanya pada keberhasilan untuk menduduki posisi Presiden Republik Korea, kemudian selama 3 periode berturut-turut, Park Geun-Hye berhasil memasuki Korean National Assembly atau badan legislatif Korea Selatan

dari tahun 1998 hingga 2012. Karir Park Geun-Hye terus mengalami kemajuan yang pesat dan banyak menyebarkan pengaruh politik hingga akhirnya memasuki kursi pemilihan presiden Korea Selatan pada tahun 2012 yang kemudian terpilih sebagai presiden wanita pertama Korea Selatan pada Februari 2013.

Kader Grand National Party, Saenuri Party dan Legislator Korean National Assembly

Setelah *New Korea Party* dan *Democratic Party* sepakat untuk bergabung pada tahun 1997 dan kemudian mengganti nama menjadi *Grand National Party*, Park Geun-Hye memulai karir politiknya dengan bergabung menjadi kader partai *Grand National Party* yang membawanya pada keberhasilan memenangkan pemilihan umum legislatif daerah bagian Daegu pada periode 1998-2000. Park Geun-Hye terpilih mewakili Daegu sebanyak 5 periode hingga tahun 2008, sebelum ia mulai memasuki pemilihan presiden tahun 2012. Selain menjadi legislator, Park juga dipercaya untuk menjadi wakil presiden GNP hingga tahun 2000. Pada saat menjabat sebagai legislator periode pertama pada tahun 1998 hingga tahun 2000, Park Geun-Hye berhasil menghasilkan 1.617 undang-undang dan merupakan keberhasilan tertinggi selama sejarah majelis Korea saat itu. Park juga sempat menjadi Anggota Komite Perdagangan, Industri dan Energi dan Anggota Panitia Khusus Urusan Perempuan di periode pertama ia menduduki kursi national assembly. (Korea.net, 2013) Pengalaman Park sebagai direktur *Yuk Young Foundation* membantu Park dalam merumuskan kebijakan untuk pemberdayaan dan perlindungan wanita. Park Geun-Hye bersama rekannya dalam komite perdagangan, industri dan energi juga berhasil memasukkan kepentingan ekonomi, industri dan kerjasama bersama Korea Selatan dengan Jepang dalam kerangka *Japan-Republic of Korea Joint Declaration: A New Japan-Republic of Korea Partnership towards the Twenty-first Century* pada 8 Oktober 1998. Lima tahun setelah ia menjabat di majelis nasional, ia mulai mendapat guncangan politik dari partai yang mengusungnya. Park kembali mendapat kepercayaan untuk menjadi wakil presiden Grand National Party pada masa bakti 2000-2004. Akan tetapi ia hanya menjabat selama dua tahun dan kemudian mengundurkan diri pada tahun 2002. Alasan Park mengundurkan diri karena ia tidak sejalan dengan presiden GNP saat itu yaitu Lee Hoi Chang merupakan seorang pemimpin dengan ciri khas kepemimpinan yang otoriter. (Korean.net, 2013).

Setelah Park meninggalkan GNP, ia bergabung dengan partai yang sesuai dengan visi dan misinya yaitu *Korea Coalition for The Future* dan kemudian ia terpilih kembali untuk duduk di kursi legislatif majelis nasional serta ikut menjadi calon presiden partai pada pemilu tahun 2002. Keluarnya Park dari GNP memberikan kesempatan padanya untuk melakukan kunjungan ke luar negeri termasuk ke Korea Utara dan bertemu dengan pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong Il. Park Geun-Hye memulai mengobservasi hubungan Korea Selatan dan Korea Utara terutama hubungan keduanya di masa depan. Untuk periode keduanya menjadi seorang legislator, Park Geun-Hye semakin banyak pengaruh di dalam majelis nasional. Setelah mengunjungi Pyongyang dan bertemu dengan Kim Jong Il, Park dipercaya menjadi salah satu anggota komite unifikasi, urusan luar negeri dan perdagangan. Disaat yang sama, Park juga menjadi bagian dari komite kesetaraan gender dan urusan keluarga dan komite ilmu pengetahuan, teknologi, informasi dan telekomunikasi. Park banyak berkontribusi karena pada kesempatannya menduduki ketiga komite ini sesuai dengan kompetensi yang ia miliki. Namanya terus dikenal dan sangat berpengaruh dalam segala kebijakan dalam negeri Korea Selatan. Akhir tahun 2003, Park kembali untuk memutuskan untuk kembali ke dalam GNP setelah masa jabatan Lee Hoi Chang usai. Di tahun yang sama, Park langsung masuk ke dalam bursa pemilihan presiden GNP. Di tahun 2004, Park Geun-Hye terpilih menjadi presiden GNP hingga

2006 dan membawa GNP pada kondisi yang stabil pasca kepemimpinan Lee Hoi Chang. Karir Park sebagai legislator semakin berkembang setelah ia kembali terpilih untuk mewakili Daegu pada pemilihan legislatif periode ketiganya yaitu tahun 2004 hingga 2008. Pada periode ini, Park Geun-Hye duduk di komite pertahanan nasional, komite administrasi pemerintahan dan otonomi daerah serta komite buruh dan lingkungan.

Tahun 2007, *Grand National Party* melakukan musyawarah untuk menentukan bakal calon presiden dari GNP untuk maju dalam bursa pemilihan Presiden Korea ke 17 yang akan diselenggarakan tanggal 17 Desember 2007. Dalam persaingannya, Park Geun-Hye dihadapkan oleh Lee Myung Bak. Sayangnya, Park Geun-Hye belum banyak mendapatkan dukungan dan mengalami kekalahan pada bursa pencalonan dari GNP. GNP diwakili oleh Lee Myung Bak yang akhirnya terpilih menjadi Presiden Republik Korea pada masa jabatan 2007-2012. Pada pemilu legislatif 2008, Park kembali terpilih untuk masuk ke dalam jajaran legislator di majelis nasional Korea hingga tahun 2012. Pada periode ini, Park menduduki 2 komite yaitu komite kesehatan dan kesejahteraan keluarga dan komite strategi keuangan. Dalam periode ini, Park Geun-Hye lebih memperisapkan dirinya untuk maju dalam pemilihan Presiden Korea Selatan tahun 2012. Tahun 2011, Park Geun-Hye menulis sebuah artikel yang berjudul *A New Kind of Korea: Building Trust Between Seoul and Pyongyang* yang kemudian diterbitkan oleh majalah *foreign affairs*. Dalam tulisannya ini, Park Geun-Hye mulai memperkenalkan konsep kepercayaan dalam hubungan dengan Korea Utara. Dalam rangka untuk mengubah Semenanjung Korea dari zona konflik menjadi zona kepercayaan, Korea Selatan harus mengadopsi kebijakan "trustpolitik," membangun harapan yang saling mengikat berdasarkan norma-norma global. (Park, 2011)

Tulisan Park Geun-Hye terkait kebijakan terhadap Korea Utara ini disambut baik oleh pemerintahan dan GNP. Menanggapi tulisan Park Geun-Hye dengan konsep dan image baru Korea Selatan beserta konsep kepercayaan dalam menghadapi Korea Utara, pada tahun 2012 *Grand National Party* melakukan merger dengan *Unification Party* dan *The Future Hope Alliance* pada November 2012 dan kemudian berganti nama menjadi Partai Saenuri. (Saenuri, 2014) Partai Saenuri melakukan kongres untuk memilih wakil Saenuri dalam calon presiden Korea Selatan ke 18 di bulan Agustus. Pada pemilihan ini, Park Geun-Hye berhasil memenangkan calon kandidat Presiden Korea Selatan sebesar 83,97%.

Gambar 1.
Park Geun-Hye Elected Saenuri Party Presidential Candidate

Candidate	Place	Votes	Percentage
Park Geun-hye	Nominated	86,589	83.97%
Kim Moon-soo	2 nd	8,955	8.68%

Kim Tae-ho	3 rd	3,298	3.20%
Yim Tae-hee	4 th	2,676	2.69%
Ahn Sang-soo	5 th	1,600	1.55%
		103,118	100.0%

Sumber: Park Geun-Hye Elected Saenuri Party Presidential Candidate diakses melalui laman www.english.kbs.co.kr

Tanggal 10 Juli 2012, bertempat di Time Square Yeongdong-pu, Seoul, Park Geun-Hye mengumumkan pencalonan dirinya untuk maju menjadi bakal calon Presiden Korea Selatan ke-11. Dalam kampanye yang diadakan pertama kali di depan masyarakat Korea Selatan, Park Geun-Hye mengangkat masalah ekonomi yang berbasis demokrasi, menekankan hak untuk meraih kebahagiaan bagi masyarakat Korea serta pelayanan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat Korea. (news.donga.com, 2012) Kampanye Park yang pertama kali menarik perhatian dan menjadi sorotan utama masyarakat Korea Selatan. Hal ini dikarenakan sejak tahun 2008, ia merupakan orang yang paling berpengaruh dalam majelis nasional dan merupakan calon terkuat kedua setelah Lee Myung Bak dalam *Grand National Party* hal ini dibuktikan dengan diadakannya jajak pendapat yang menunjukkan bahwa Park Geun-Hye lebih unggul sekitar 25 hingga 45%. (News.naver.com, 2012) Setelah kemenangannya dalam pemilu legislatif 2012, rating Park Geun-Hye meningkat dalam survey yang dilakukan oleh Mono Research sebesar 45,5% dibandingkan pesaing terkuatnya dari Partai Demokrat, Moon Jae-In. Moon Jae-In merupakan seorang sekretaris umum pada masa pemerintahan Presiden Roh Moo Hyun dan ia juga sangat mendukung kerjasama dan konstruksi nasional bersama dengan Korea Utara yang dirumuskan dalam *Sunshine Policy* pada pemerintahan Kim Dae Jung. (news.naver.com, 2012)

Tanggal 19 Desember 2012, Republik Korea mengadakan pesta demokrasi terbesar setiap lima tahun sekali yaitu pemilihan presiden ke-18 yang merupakan pesta demokrasi ke-6 dalam sepanjang sejarah demokrasi Korea Selatan. Dalam pemilihan presiden kali ini, muncul dua calon kandidat yang berasal dari partai besar Korea Selatan, Park Geun-Hye yang berasal dari Partai Saenuri dan Moon Jae-In berasal dari Partai Demokrat. 30.700.000 masyarakat sebagai pemilih menghasilkan jumlah suara sebanyak 75,8%, Park Geun-hye yang berasal dari Partai Saenuri terpilih sebagai presiden Korea Selatan perempuan pertama dengan total suara sebesar 51,6% dan mengalahkan tipis untuk lawannya Moon Jae-In sebesar 48%. (The Korea Times, 2012)

Park Geun-Hye menang telak di 13 provinsi besar, terutama di Provinsi bekas daerah pemilihannya pada pemilihan legislatif selama lebih dari 3 periode yaitu Provinsi Gyongsang Utara dengan perolehan suara sebesar 80,82%. Setelah kemenangannya dalam pemilihan presiden Desember 2012, Park Geun-Hye kemudian dilantik pada Februari 2013. Banyak masyarakat yang menilai bahwa kemenangannya dalam pemilu tidak hanya faktor performa kinerja Park

yang memuaskan, akan tetapi juga faktor ayahnya, Park Chung Hee, yang sangat membawa Korea Selatan pada perbaikan ekonomi dan infrastruktur, yang dirasakan oleh sebagian besar dialami oleh golongan tua Korea Selatan.

Terpilihnya Park Geun-Hye sebagai Presiden Republik Korea merupakan kemenangan yang tidak hanya dirasakan bagi Partai Saenuri, akan tetapi juga merupakan kemenangan seluruh masyarakat Korea Selatan. Dalam menjalankan roda pemerintahannya dan mencapai kepentingan Korea Selatan, Park Geun-Hye juga harus meluaskan hubungannya ke dalam komunitas internasional dan menjalin hubungan persahabatan dengan pemimpin-pemimpin dunia. Selain itu, Park Geun-Hye juga menawarkan perspektif baru kepada masyarakat Korea Selatan pada khususnya dan masyarakat dunia pada umumnya bahwa kebahagiaan adalah hal utama dalam menjalankan berbagai hubungan. Keinginan ini juga disampaikan oleh Presiden Park Geun-Hye dalam pidato pelantikannya yang berjudul *Opening a New Era of Hope*. Dalam pidatonya ia menyatakan bahwa

“The new Administration will usher in a new era of hope premised on economic revival, happiness for the people, and cultural enrichment. I will raise the quality of our science and technology to world-class levels. The creative economy will be brought to fruition by applying the results of such endeavors across the board. To ease tensions and conflicts and further spread peace and cooperation in Asia, I will work to strengthen trust with countries in the region, including the United States, China, Japan, Russia and other Asian and Oceanic countries” (Choi, 2013)

Sesuai dengan pidato yang disampaikannya, Park merumuskan tiga kebijakan politik luar negeri pemerintahannya, pertama, *The Northeast Asia Peace and Cooperation Initiative (NAPCI)*, *middle power diplomacy* dan *Trust Building Process towards North Korea*. Ketiga kebijakan ini berlandaskan keamanan dan kerjasama untuk terciptanya perdamaian dunia.

Kebijakan luar negeri *The Northeast Asia Peace and Cooperation Initiative (NAPCI)*, digunakan Presiden Park Geun-Hye untuk menyelesaikan permasalahan inti antar negara di kawasan Asia terutama Asia Timur Laut yang dikenal sebagai Asia Paradox dimana gagalnya sistem lama saling ketergantungan ekonomi untuk menghasilkan kepercayaan politik dan militer antara negara-negara Asia Timur Laut. Kebijakan ini bertujuan untuk membentuk sistem kerjasama baru dengan memperkuat hubungan kerjasama bilateral maupun multilateral antara negara-negara Asia Timur Laut maupun negara kawasan Asia lainnya pada akhirnya, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perdamaian dan kemakmuran bagi seluruh Asia dan dunia. Sedangkan, kebijakan *Middle Power Diplomacy* bertujuan untuk membangun status Korea Selatan sebagai negara *Middle Power* dan mengikutsertakan diri dalam isu-isu penting di tingkat internasional. Lebih spesifik, kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat jaringan Korea Selatan dengan negara *Middle Power* lainnya untuk menjadi pemimpin global yang memberikan kontribusi untuk perdamaian global dan peningkatan hak asasi manusia, meningkatkan kerjasama dengan seluruh dunia pada keamanan global dan isu-isu ekonomi, dan meningkatkan upaya kerjasama pembangunan. (Choi, 2013) Park Geun-Hye, dalam menjalankan kebijakannya juga memperlihatkan hubungan yang sangat fleksibel dengan beberapa negara yang berbeda ideologi seperti China dan Russia. Sikap Park Geun-Hye ini diilhami dari Park Chung Hee dalam deklarasi 1973 yang berisi bahwa Korea Selatan harus melakukan sikap terbuka kepada negara manapun meskipun berbeda ideologi dan sistem pemerintahan.

Setelah berakhirnya Perang Dingin, hubungan Korea Selatan dengan China dan Rusia menjadi lebih solid. Korea Selatan telah mengambil kerjasama ekonomi, teknologi tinggi, ilmu

pengetahuan, dan berbagai macam energi serta berpartisipasi dan membantu negara tetangganya untuk menjadi mitra yang sangat diperhitungkan di tingkat internasional yang nantinya akan menguntungkan bagi Korea Selatan. Selama ini juga Korea Selatan melakukan aliansi keamanan bersama dengan Amerika Serikat dan Jepang untuk membantu penjagaan wilayah keamanan Semenanjung Korea dan Asia pada umumnya. Park Geun-Hye tahu betapa pentingnya untuk menjaga aliansi dengan Amerika Serikat dan Jepang, sebab kebangkitannya dalam perang dunia II dan perang saudara dengan Korea Utara tidak lepas dari bantuan kedua negara ini meskipun Korea Selatan dan Jepang pernah mengalami masa-masa sulit, akan tetapi dengan berbagai kerjasama bilateral diberbagai bidang diharapkan keduanya dapat menjaga hubungan baik yang telah dibina selama ini.

TRUST BUILDING PROCESS UNTUK KEBIJAKAN REUNIFIKASI

Untuk menghadapi Korea Utara dan melanjutkan upaya reunifikasi pada pemerintahan sebelumnya, Presiden Park Geun-Hye mengeluarkan kebijakan yang diberi nama kebijakan trust building process. Kebijakan berbasis kepercayaan ini disosialisasikan pertama kali oleh Presiden Park pada sebuah artikel yang ia tulis dalam laman foreign affairs pada tahun edisi bulan September/Oktober 2011 yang berjudul *A New Kind of Korea: Building Trust Between Seoul and Pyongyang*. Dalam artikel ini, Presiden Park Geun-Hye menginginkan sebuah kondisi yang damai di kawasan Semenanjung Korea. Park Geun-Hye juga menyatakan bahwa dalam proses perdamaian yang selama ini ditempuh diakibatkan oleh kurangnya rasa percaya antar kedua belah pihak. Selain itu, terdapat hal yang menarik ketika Presiden Park menuliskan pesan yang mengindikasikan terdapat latar belakang pengalaman pahit pribadi yang pernah dialaminya dalam memunculkan pemikiran untuk memutuskan menggunakan trust building process sebagai cara untuk berdamai dan reunifikasi Semenanjung Korea. Presiden Park menuliskan:

On August 15, 1974, South Korea's Independence Day, I lost my mother, then the country's first lady, to an assassin acting under orders from North Korea. That day was a tragedy not only for me but also for all Koreans. Despite the unbearable pain of that event, I have wished and worked for enduring peace on the Korean Peninsula ever since. (Geun-Hye, 2011)

Menurut asumsi penulis, segala latar belakang pengalaman dinamika kehidupan dan karir politik Presiden Park Geun-Hye di masa lalu terbingkai dalam proses psikologis yang membentuk kepribadian dan pemikiran rasional Presiden Park sebagai decion maker untuk menentukan dan mengembangkan sikap politiknya dengan menggunakan kebijakan trust building process dalam upaya reunifikasi Semenanjung Korea. Hal ini dapat dijelaskan berdasarkan proses-proses psikologi dari latar belakang historis dan dinamika karir politik Presiden Park Geun-Hye, adalah sebagai berikut:

1. Keyakinan: Park Geun-Hye menganut keyakinan Budha dengan aliran konfusius yang selalu mengajarkan tentang kepercayaan, kedamaian, harmoni, dan saling menghargai. Keyakinan ini telah terbentuk sejak Park Geun-Hye kecil sehingga ajaran-ajaran tersebut telah tertanam dan menjadi satu set pemikiran yang ia selalu pegang di dalam kehidupan sehari-hari.
2. Ideologi: Ideologi demokrasi liberal adalah ideologi yang diperkenalkan oleh Park Chung-Hee sebagai orang tua Park Geun-Hye yang saat itu menjadi seorang Presiden Korea Selatan. Ideologi ini mencerminkan identitasnya sebagai warga negara. Ideologi demokrasi liberal berarti memiliki arti kebebasan dan menekankan pada pemenuhan hak-

hak masyarakat. Hingga saat ini, ideologi ini masih tetap dilaksanakan oleh Presiden Park Geun-Hye.

3. Komunikasi: Berbicara mengenai komunikasi tidak terlepas dari penerima dan pengirim pesan. Terkait hubungan Park Geun-Hye dan Korea Utara dalam hal ini yang berkaitan dengan kebijakan trust building process, Park Geun-Hye selalu melakukan komunikasi secara terbuka dengan Korea Utara meskipun ia memiliki pengalaman dan trauma akibat pembunuhan ibunya oleh mata-mata Korea Utara. Komunikasi yang terjadi antar kedua belah pihak ini menyebabkan terjadinya proses pertukaran informasi sehingga Park Geun-Hye dapat mengambil kesimpulan bahwa selama ini tidak adanya rasa kepercayaan atau trust dalam upaya reunifikasi Semenanjung Korea dan untuk menimbulkan rasa kepercayaan dibutuhkan situasi yang damai dan tidak banyak memunculkan kembali konflik atau perselisihan.

4. Konflik: Hubungan Semenanjung Korea yang selama ini penuh dengan konflik dan permasalahan juga berpengaruh terhadap proses pemikiran rasional Presiden Park khususnya akibat yang muncul dari adanya konflik. Akibat dari konflik ini mengindikasikan akan memunculkan rasa trauma. Kematian salah satu orang tua Presiden Park akibat konflik dengan Korea Utara merupakan trauma yang berat dan salah satu penguat psikologis sehingga membentuk kepribadian Presiden Park Geun-Hye untuk segera bertindak melakukan upaya penyelesaian konflik dengan cara yang damai agar tidak adanya kejadian yang berulang dikemudian hari yang akan berdampak pada dirinya maupun masyarakat Semenanjung Korea.

5. Otoritarianisme dan kepemimpinan: Park Geun-Hye memiliki pengalaman terkait otoritarianisme dan kepemimpinan. Ayah Park Geun-Hye merupakan seorang pemimpin dengan karakteristik otoriter yang mendapat pengaruh latar belakang militer yang bertentangan dengan latar belakang ideologi yang dipercayainya. Melihat hal ini penulis mengasumsikan bahwa Park Geun-Hye tidak dapat menerima dua hal yang bertentangan ini sehingga Park Geun-Hye tidak mengambil contoh kepemimpinan pada sang ayah sepenuhnya. Tindakan yang sama ditunjukkan juga saat Park Geun-Hye memilih untuk keluar dari Grand National Party pada masa kepemimpinan Lee Hoi Chang dengan alasan yang sama yaitu kepemimpinan yang otoriter. Hal ini mempengaruhi pemikiran Presiden Park untuk menentukan gaya kepemimpinannya yang konsisten dengan corak kepemimpinan demokrasi liberal akan tetapi tegas karena Park Geun-Hye kecil juga tumbuh dalam lingkungan militer.

6. Afiliasi Politik: Dinamika karir politik Presiden Park Geun-Hye tidak bisa dilepaskan dari pertalian atau hubungan dengan kelompok politik terdekatnya. Pengalaman sebagai legislator dan kader partai Grand National dan Partai Saenuri juga berpengaruh terhadap proses berfikir secara rasional dalam penentuan sikap dan kebijakan. Partai Saenuri sejak awal dibentuk merupakan partai gabungan yang mendukung untuk terjadinya reunifikasi yang damai. Diketahui juga bahwa pengalamannya sebagai seorang legislator tidak hanya pada satu komite, akan tetapi hampir di seluruh komite yaitu komite perdagangan, industri, energi, unifikasi dan urusan luar negeri, ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi dan telekomunikasi, administrasi pemerintahan, otonomi daerah, buruh dan lingkungan, kesehatan, kesejahteraan keluarga dan strategi keuangan sehingga Park Geun-Hye memiliki banyak informasi dan referensi dari pengalamannya sebagai legislator yang juga banyak berinteraksi dengan banyak informan.

Proses-proses psikologi dari latar belakang Park Geun-Hye ini akan tertanam dalam pikirannya dan akan membantu serta membentuk skema interpretasi yang digunakan untuk mengidentifikasi, memberikan tanda, dan pemetaan yang mampu menafsirkan kepribadian dan pola pikir rasional Presiden Park Geun-Hye hingga akhirnya dapat memutuskan untuk memilih dan menggunakan kebijakan *trust building process* sebagai kebijakan yang tepat dan dapat mengakomodasi upaya perdamaian dan reunifikasi Semenanjung Korea.

Dari penjelasan yang disebutkan di atas dapat menjelaskan bahwa dinamika kehidupan pribadi Presiden Park Geun-Hye yang menyedihkan dan tidak bahagia ditambah dengan pengaruh ideologi, keyakinan, faktor pendidikan dari keluarga, kepemimpinan sang ayah dapat serta dinamika karir politik Park Geun-Hye pada lingkungan yang kondusif dan mendukung penciptaan situasi yang damai dan aman membentuk kepribadian atau sifat hakikinya yang selalu menginginkan perdamaian dan kebahagiaan dalam memilih dan menggunakan kebijakan *trust building process* sebagai upaya reunifikasi Semenanjung Korea.

KEBIJAKAN REUNIFIKASI BERBASIS KEPERCAYAAN *TRUST BUILDING PROCESS*

Sebuah usaha untuk menyatukan kembali sebuah bangsa dan keluarga yang terpisah secara terpaksa telah berjalan kurang lebih selama lima puluh tahun. Berbagai kebijakan, perjanjian dan pertemuan telah beberapa kali disepakati dan sempat membawa hubungan kedua Korea pada titik terbaik seperti *Sunshine Policy* pada masa pemerintahan Presiden Kim Dae Jung. Akan tetapi, hubungan yang harmonis tersebut tidak berlangsung lama karena tindakan Korea Utara yang tidak berjalan kooperatif.

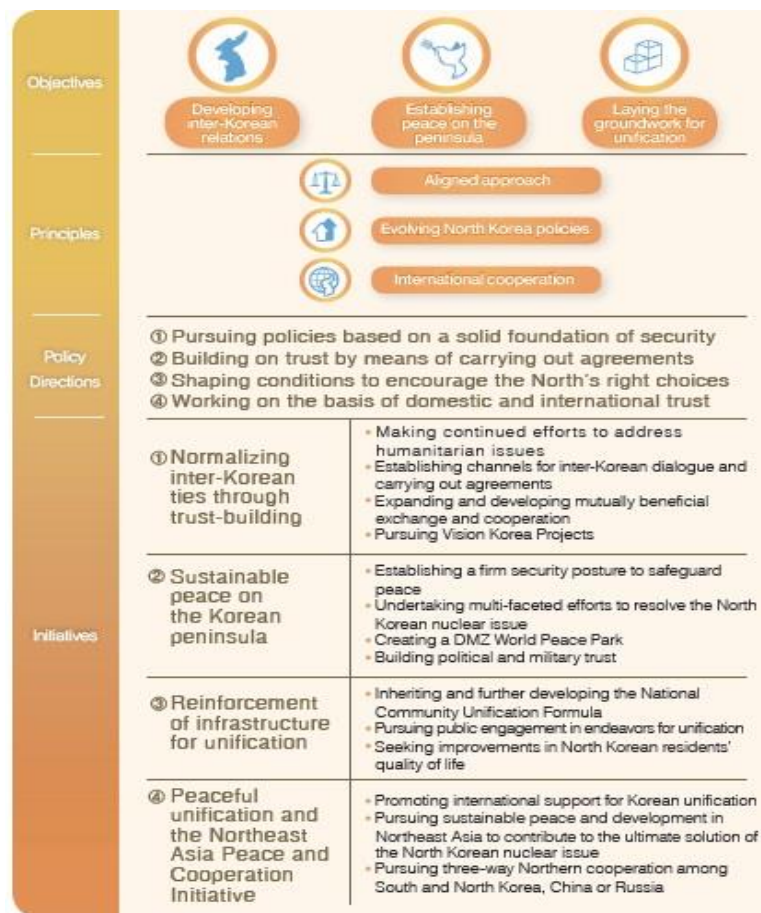
Tahun 2009 hingga tahun 2012 merupakan tahun terberat dalam hubungan modern Korea Selatan dan Korea Utara. Kebijakan *Mutual Benefits and Common Prosperity* serta *Visison 3000* dan rencana denuklirisasi Korea Utara pada pemerintahan Presiden Lee Myung Bak semakin memperlebar jurang konflik kedua Korea. Korea Utara semakin tidak terkendali dengan beberapa program pengembangan nuklir dan beberapa uji coba rudal yang mengarah ke Korea Selatan. Rasa kepercayaan dan keinginan untuk bersama-sama melakukan program reunifikasi semakin jauh dari harapan. Pada bulan Februari 2013, Presiden Park Geun-Hye secara resmi dilantik menjadi Presiden ke-11 Republik Korea. Berbagai harapan muncul kepada Park untuk mengatasi krisis dan segera melakukan upaya reunifikasi Semenanjung Korea. Untuk menghadapi krisis berkepanjangan dan upaya reunifikasi, Presiden Park segera merumuskan dan memilih sebuah kebijakan yang tepat dalam hubungan Semenanjung Korea saat ini. Presiden Park memilih sebuah kebijakan baru yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan antar-Korea, membangun perdamaian yang abadi di Semenanjung Korea, dan memperjelas jalan bagi upaya reunifikasi yang dikemas dalam kebijakan *Trust Building Process*.

Kebijakan *Trust Building Process* dipilih Presiden Park karena kebijakan ini sangat mengedepankan kepentingan masyarakat Semenanjung Korea yang penuh cinta kasih, perdamaian, saling percaya dan keamanan yang sesuai prinsip-prinsip rekonsiliasi. Kebijakan berbasis kepercayaan atau *trust* merupakan landasan dasar Presiden Park dalam kebijakannya terkait rencana reunifikasi dengan Korea Utara. *Trust* menjadi hal utama untuk membangun hubungan yang lebih baik karena sejak resmi kedua Korea terpisah, kedua belah pihak mulai merasa tidak percaya satu sama lain. Dalam falsafah konfusius Korea pun juga menggambarkan bahwa kepercayaan akan menjadikan kekuatan bangsa Korea, sesuai dengan pepatah bahwa menepuk tangan hanya menggunakan satu tangan adalah mustahil, begitu pula dengan hubungan

Korea Selatan dan Korea Utara, harus ada kerjasama yang solid dan konsisten agar keduanya dapat hidup berdampingan bersama. *Trust Building Process* dilaksanakan oleh Presiden Park Geun-Hye secara hati-hati dan menggunakan pendekatan psikologis kepada Korea Utara agar terjadi keseimbangan antara penggunaan kekuatan hard dan soft dalam kegiatan dialog, penjagaan keamanan, kerjasama inter-Korea dan kerjasama lainnya. (Unification, 2015)

Perbedaan lain kebijakan *Trust Building Process* dengan kebijakan lainnya adalah pada kebijakan ini, pemerintah Korea Selatan mencoba untuk membuka hubungan yang baru dengan Korea Utara sehingga kebijakan ini tidak hanya untuk meredam konflik berkepanjangan, akan tetapi untuk membuat kesepakatan baru dengan Korea Utara. Kebijakan ini sesungguhnya telah diperkankan Presiden Park Geun-Hye dalam sebuah artikel yang ditulisnya setahun sebelum ia menjabat sebelum menjadi presiden. Ia menulis artikel yang berjudul *A New Kind of Korea: Building Trust Between Seoul and Pyongyang* dan dipublikasikan melalui Foreign Affairs

Gambar 2
Kerangka Kebijakan Trust Building Process



Pemerintahan Presiden Park Geun-hye telah menetapkan kebijakan Trust Building Proses di Semenanjung Korea yang berdasarkan pada pilar keamanan yang kuat dengan tujuan membangun kepercayaan antara kedua Korea. Konsep saling percaya akan memungkinkan kedua Korea untuk lebih mengembangkan hubungan antar Korea, membangun perdamaian abadi di semenanjung Korea, dan meletakkan dasar untuk reunifikasi. Untuk menjaga perdamaian di Semenanjung Korea, perlu adanya tindakan

membentuk kesepakatan baru dan mengurangi tindakan-tindakan provokatif yang dapat memicu kembali konflik. Langkah pertama yang dilakukan dalam menciptakan keamanan adalah dengan mengurangi tindakan-tindakan provokatif. Membangun kembali sebuah kesepakatan dan pemahaman antar kedua belah pihak. Dalam elemen rekonsiliasi, menunjukkan bahwa sebuah kesepakatan baru akan memunculkan adanya pengungkapan antar kedua belah pihak, selama proses tersebut akan timbul pernyataan dan klarifikasi akan sebuah kebenaran, sehingga akan mengurangi rasa ketidak-amanan dan saling tidak percaya. Kegiatan mengurangi tindakan provokatif Konsep kepercayaan sebagai prioritas, pemerintahan Presiden Park akan terus melakukan pendekatan kebijakan kepada Korea Utara yang akan menghasilkan siklus yang baik yang terdiri dari membangun kepercayaan, mengembangkan hubungan antar Korea dan membangun perdamaian di semenanjung Korea.

Berdasarkan konsep yang ditetapkan, beberapa inisiatif pelaksanaan yang mendukung berjalannya kebijakan Trust Building Process. Diantaranya yaitu normalisasi hubungan dua Korea melalui pembangunan kepercayaan, Perdamaian Abadi Semenanjung Korea, penguatan infrastruktur untuk proses reunifikasi, Unifikasi Damai dan Prakarsa Perdamaian dan Kerjasama di Asia Timur Laut. Keseluruhan prakarsa dan pelaksanaan kebijakan ini tidak hanya melibatkan pihak pemerintah sebagai garda terdepan akan tetapi juga melibatkan masyarakat sebagai pemacu psikologis yang akan menimbulkan rasa kepercayaan yang lebih progresif.

Kesimpulan

Perang Korea yang terjadi pada tahun 1950 membuat hubungan antar kedua Korea dalam hubungan yang sangat memprihatinkan. Korea Selatan sebagai negara pemegang prinsip perdamaian terus konsisten untuk melakukan berbagai macam upaya untuk melaksanakan perdamaian Semenanjung Korea melalui reunifikasi. Akan tetapi, berbagai kebijakan dari beberapa pemerintahan tidak mampu untuk menyelesaikan konflik berkepanjangan ini.

Beberapa kebijakan sempat membawa hubungan kedua bangsa mencapai hubungan yang lebih baik. Akan tetapi hubungan yang sempat harmonis ini kembali memburuk pada saat pemerintahan Presiden Lee Myung Bak. Pada pemerintahannya, Presiden Lee bersikap konfrontatif dan provokatif terhadap Korea Utara. Memanasnya kembali hubungan di Semenanjung Korea mengakibatkan sikap Korea Utara yang tidak terkontrol. Sejumlah uji coba senjata nuklir, roket dan rudal jarak jauh pun sempat dilakukan oleh Korea Utara dan menyebabkan kondisi yang tidak aman di kawasan Semenanjung Korea.

Di tengah situasi Semenanjung Korea yang tidak aman, Park Geun-Hye terpilih sebagai Presiden ke-11 Republik Korea. Sebagai seorang Presiden Park juga memiliki kebijakan untuk mengatasi hubungan dengan Korea Utara. Dengan menggunakan Trust Building Process Presiden Park melakukan upaya reunifikasi dalam mencapai perdamaian Semenanjung Korea. Latar belakang pengalaman pribadi yang dialaminya dan berbagai dinamika karir politik di masa lalu mempengaruhi kondisi psikologis dan kepribadian Presiden Park Geun-Hye yang menjadikan dasar pemikiran rasional Presiden Park Geun-Hye untuk mengambil kebijakan ini sebagai kebijakan yang tepat dalam rangka menciptakan situasi damai Semenanjung Korea dalam sebuah kerangka kerjasama baru.

Trust Building Process juga diambil Presiden Park Geun-Hye karena kebijakan ini mengandung unsur rekonsiliasi yang berdasarkan keamanan, perdamaian, keadilan dan kemanusiaan. Kebijakan ini berbuah manis dengan beberapa kegiatan bersama dan beberapa perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Presiden Park-Geun-Hye akan mengajak Korea Utara pada suatu kesepakatan yang baru untuk menciptakan hubungan kepercayaan dan damai. Dengan melakukan kerjasama antar pemerintah dan masyarakat, kebijakan ini berjalan kearah positif.

DAFTAR PUSTAKA

- (2012, Juli 10). Retrieved Januari 23, 2016, from news.donga.com:
<http://news.donga.com/3//all/20120710/47651073/1>
- (2012). Retrieved Januari 23, 2016, from News.naver.com:
<http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=100&oid=001&aid=0005258502>
- (2012). Retrieved Januari 23, 2016, from news.naver.com:
<http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=100&oid=001&aid=0005258502>
- (2012, Desember). Retrieved Januari 23, 2016, from The Korea Times:
http://www.koreatimes.co.kr/www/news/nation/2012/12/608_127229.html
- Cheon, S. (2013, May 6). Retrieved Oktober 20, 2015, from
http://csis.org/files/publication/130506_Trust_President_Park.pdf
- Choi, K. (2013). Retrieved Januari 24, 2016, from www.asanist.org:
<http://en.asanist.org/contents/evaluating-president-park-geun-hyes-foreign-policy-in-its-1st-year/>
- Geun-Hye, P. (2011, 09 01). Retrieved May 12, 2016, from www.foreignaffairs.com:
<https://www.foreignaffairs.com/articles/northeast-asia/2011-09-01/new-kind-korea>
- House, B. (2014). Retrieved Januari 19, 2016, from www.president.go.kr
- House, B. (2014). Retrieved Januari 19, 2016, from www.president.go.kr/
- Korea.net. (2013). Retrieved Januari 19, 2016, from
<http://www.korea.net/Government/Administration/President-Park-Geun-Hye>
- Korean.net. (2013). Retrieved Januari 19, 2016, from
<http://www.korea.net/Government/Administration/President-Park-Geun-Hye>

Lee, C. Y. (2012, November 18). Korean Culture and It's Influence on Business Practice in South Korea. *The Journal of International Management*, 187.

Mas'oeud, M. (1990). *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3S.

Park, G.-H. (2011, September 01). Retrieved Januari 23, 2016, from <https://www.foreignaffairs.com/articles/northeast-asia/2011-09-01/new-kind-korea>

Saenuri, P. (2014). Retrieved Januari 23, 2016, from <https://www.saenuriparty.kr/web/eng/about/history.do>

Unification, M. o. (2015). Retrieved Januari 24, 2016, from www.eng.unikorea.go.kr

Unification, M. o. (Director). (2015). *Vision for The Unified Korea* [Motion Picture].

Yang, Seung Yoon dan Mochtar Mas'oeud. (2005). *Memahami Politik Korea*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.